

OPTIMALISASI GURU SEBAGAI UJUNG TOMBAK PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL

LAURENSIA M PERANGIN ANGIN
Dosen Jurusan PPSD Prodi PGSD FIP UNIMED

ABSTRAK

Tujuan pendidikan yang kita harapkan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan". Namun dewasa ini tujuan pendidikan yang telah dilontarkan diatas tidaklah tercapai secara maksimal. Salah satu hal yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah system pendidikan atau kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran. Di balik perubahan kurikulum yang terus-menerus, ada hal yang terlupakan yaitu guru, guru di Indonesia hanya 60% yang layak mengajar, sisanya masih perlu pembenahan. Hal itu terjadi disebabkan kurang pelatihan skill, kurangnya pembinaan terhadap kurikulum baru.

Kata Kunci : Optimalisasi, Guru, Kurikulum Pendidikan Nasional

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan yang kita harapkan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan". Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan, cerdas, aktif, kreatif, terampil, jujur, berdisiplin dan bermoral tinggi, demokratis, dan toleran dengan mengutamakan persatuan bangsa dan bukannya perpecahan.

Namun dewasa ini tujuan pendidikan yang telah dilontarkan diatas tidaklah tercapai secara maksimal. Kita bisa melihat betapa buramnya potret pendidikan di Negeri kita. Pendidikan bagaikan daun yang terbang dibawa angin, kemana pun ia akan pergi. Salah

satu hal yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah system pendidikan atau kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti kita ketahui, system kurikulum di Indonesia mengalami paradigma yang tentu sangat membingungkan para tenaga pengajar di Indonesia yakni guru. Pemerintah senantiasa melaksanakan perubahan kurikulum tanpa memperhitungkan apakah guru mampu melaksanakan kurikulum tersebut atau tidak. Pendidikan Indonesia selalu gembargembor tentang kurikulum baru...yang diharapkan lebih tepat sasaran dan lebih baik.

Di balik perubahan kurikulum yang terus-menerus, ada hal yang terlupakan yaitu guru, guru di Indonesia hanya 60% yang layak mengajar, sisanya masih perlu pembenahan. Hal itu terjadi disebabkan kurang pelatihan skill, kurangnya pembinaan terhadap kurikulum baru.

Berdasarkan hal diatas maka penulis mengambil judul Optimalisasi

Guru Sebagai Ujung Tombak Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Nasional yang mengkaitkannya juga dengan peran organisasi profesi serta bagaimana Pemerintah sebagai Stakeholder berperan dalam pendidikan di Indonesia

PEMBAHASAN

Pengaruh Perubahan Kurikulum di Indonesia

Istilah “kurikulum” memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar – pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu hingga sekarang. Hingga abad ke 20, kurikulum merujuk kepada kandungan dan bahan pembelajaran yang berkembang yaitu ‘apa itu persekolahan.’

Ralp Tyler (1949) dalam diktat Telaah Kurikulum mendefinisikan “kurikulum sebagai semua pelajaran – pelajaran siswa yang direncanakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencapai tujuan – tujuan pendidikan.” Sedangkan Pasal 1 Butir 19 UU. No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, “kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.” Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan kurikulum adalah segala pengalaman anak di sekolah di bawah bimbingan sekolah.

Kurikulum di Indonesia mengalami berbagai perubahan di hampir di setiap dekadanya. Dimulai dari kurikulum 1968 dan sebelumnya, kurikulum 1972, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum Berbasis Kompetensi versi

Tahun 2002 dan 2004, KBK versus KTSP, hingga pertengahan Juni nanti akan diterapkan Kurikulum 2013. Perubahan kurikulum didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya . Perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional, termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan.

Menurut Soetopo dan Soemanto (1991: 38), pengertian perubahan kurikulum agak sukar untuk dirumuskan dalam suatu devinisi. Suatu kurikulum disebut mengalami perubahan bila terdapat adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu, yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja.

Sedangkan menurut Nasution (2009:252), perubahan kurikulum mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara untuk mencapai tujuan itu . Mengubah kurikulum sering berarti turut mengubah manusia, yaitu guru, pembina pendidikan, dan mereka-mereka yang mengasuh pendidikan. Itu sebab perubahan kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial, suatu social change. Perubahan kurikulum juga disebut pembaharuan atau inovasi kurikulum.

Namun tak selamanya perubahan kurikulum tersebut dapat diterima. Seperti halnya kurikulum yang paling update saat ini 2013, mengalami pro-kontra bahkan kritikan yang sangat tajam dari berbagai kalangan. Kurikulum 2013 yang mulai berlaku bulan Juli 2013 menuai pro dan kontra

dari masyarakat. Diantara tanggapan dari masyarakat, ternyata banyak yang kontra. Pihak yang kontra kebanyakan dari kalangan pendidik atau guru itu sendiri. Itu hal yang wajar karena pada kurikulum 2013 ini beberapa jam pelajaran dikurangi.

Ferril Irham Muzaki seorang Mahasiswa S2 Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang dalam blog (<http://berkarya.um.ac.id/2013/03/25/kurikulum-2013-antara-fakta-dan-opini/>) membeberkan beberapa opini dan fakta yang terjadi dalam penyusunan kurikulum 2013. Beliau memberikan dukungan yang positif atas kurikulum 2013 yang dicanangkan pemerintah pertengahan tahun ini. Namun tidak halnya dengan berbagai opini – opini lain yang menanggapi pendapat Ferril tersebut, mereka beranggapan bahwa kurikulum 2013 tersebut belum layak untuk diterapkan.

Detiknews (<http://news.detik.com/readfoto/2013/03/27/182924/2205566/157/2/aksi-menolak-kurikulum-2013991105462>) memberikan beberapa foto yang menyatakan penolakan atas kurikulum 2013. Belasan pendemo dari Aliansi Revolusi Pendidikan berunjuk rasa di depan Gedung Kemendikbud Jakarta, Rabu (27/03). Mereka menolak penerapan kurikulum 2013.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Ibnu Fajar dalam (<http://ibnufajar75.wordpress.com/2013/03/22/kurikulum-2013-akankah-pendidikan-di-indonesia-menjadi-lebih-baik/>) juga menyatakan penolakan atas kurikulum 2013.

Yakinkah anda dengan kurikulum 2013 yang baru akan menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi Lebih baik ?



<http://ibnufajar75.wordpress.com>

41 Total Votes

Selain itu penolakan atas Kurikulum Baru 2013 makin meluas. Seperti yang saya kutip dari Koordinator Monitoring Kebijakan Publik ICW, Febri Hendri di Kemdikbud, "<http://www.jpnn.com/read/2013/03/15/162929/Ini-Dia-Alasan-Kurikulum-Baru-Harus-Ditolak>" 1500 orang telah menandatangani petisi tentang penolakan atas konsep perubahan kurikulum yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Petisi itu telah diserahkan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Pendidikan kepada Mendikbud Muhammad Nuh, agar dijadikan acuan evaluasi perubahan kurikulum. "Setidaknya ada delapan alasan petisi Tolak Kurikulum 2013 ini."

Alasan pertama, proses perumusan kebijakan perubahan kurikulum tidak terencana dan terburu-buru. Kedua, lanjut dia, mekanisme perubahan kurikulum tidak mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Padahal, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dengan jelas telah mengamanatkan pemerintah untuk mengembangkan kurikulum dengan mengacu kepada SNP. Ketiga, pemerintah ditengarai tidak melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah

diterapkan sejak tahun 2006, tapi kini ingin mengubah kurikulum tersebut menjadi Kurikulum 2013.

Keempat, Kurikulum 2013 cenderung mematikan kreatifitas guru dan tidak mempertimbangkan konteks budaya lokal. Peralnya, kata Febri, guru telah diberikan buku pegangan dan silabus yang isinya sama sekali tanpa memikirkan konteks lokal. "Yang kelima, kami melihat target training master teacher terlalu ambisius, sementara buku untuk guru belum dicetak. Guru yang harus disiapkan itu jumlahnya ratusan ribu," tegasnya. Keenam, anggaran kurikulum 2013 mencapai angka fantastis, yaitu Rp 2,49 triliun. Tapi lebih dari setengahnya atau Rp 1,3 triliun, akan digunakan untuk proyek pengadaan buku yang berpotensi dikorupsi. Sementara, sudah menjadi rahasia umum bahwa pengadaan buku adalah lahan basah. "Dari catatan ICW sejak tahun 2004–2011 tercatat ada sekitar enam kasus pengadaan buku yang ditindak dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 54,9 miliar," sebutnya.

Alasan ketujuh, pemerintah belum mengeluarkan dokumen kurikulum 2013 resmi. "Hal ini memunculkan pertanyaan, bagaimana penyusunan buku dapat dilakukan jika dokumen kurikulum 2013 saja sampai saat ini belum resmi? Soal buku ini sebenarnya sudah mencuat awal Desember 2012. Pemerintah ketahuan telah mengumpulkan penerbit buku untuk membahas buku-buku kurikulum 2013," jelas Febri. Alasan terakhir, pengadaan buku untuk Kurikulum 2013 merupakan proyek pemborosan. Peralnya, setiap tahun sejak 2008, pemerintah aktif membeli hak cipta buku untuk menopang penyediaan buku dengan buku sekolah elektronik (BSE).

Perubahan terhadap apapun haruslah diputuskan secara bijak. Jangan sampai ganti pejabat ganti pula kebijakannya. Jika kebijakan yang masih ada masih bagus untuk dilaksanakan, maka tidak perlu ada kebijakan baru. Perubahan kebijakan tidak menjamin menjadi perubahan yang lebih baik, bisa jadi malah sebaliknya. Begitu juga dengan masalah kurikulum, jangan karena ganti pejabat maka ganti pula kurikulumnya. Seperti yang dikatakan oleh SBY yang dilansir VIVAnews (02/04/2013). "Jangan sampai ganti menteri, ganti kurikulum. Atau perubahan kurikulum ini memberikan beban ke orangtua terutama yang kurang mampu karena harus siapkan buku teks baru. Pandangan seperti itu harus didengar," ungkapny. "Diperlukan pembahasan di tingkat kabinet agar manakala kurikulum ini diberlakukan, tidak ada lagi persoalan di tingkat implementasinya," ujar Presiden di kantornya, Jakarta, Selasa 2 April 2013. "Manakala segala sesuatu sudah kita pastikan, sudah tepat dan benar, sudah siap, mari kita jalankan," kata SBY.

Guru Sebagai Elemen Terpenting dalam Mengajar Sering Terabaikan

Menilik permasalahan perubahan kurikulum yang telah diuraikan diatas, membuat banyak guru mata pelajaran yang bersangkutan kekurangan jam untuk memenuhi jam wajib 24 jam bagi yang sudah bersertifikasi. Jika kekurangan jam, maka guru harus mencari jam di sekolah lain baik sekolah negeri maupun swasta pada saju jenjang pendidikan. Jika terjadi demikian maka justru guru yang seharusnya mengajar hanya di satu satuan pendidikan (sekolah) maka menjadi di beberapa sekolah. Ini

menyebabkan guru malah tidak profesional. Jarak antara sekolah satu dengan yang lainnya kadang berjauhan. Itu pun jika guru mendapatkan jam di sekolah lain. Jika tidak, maka guru akan kekurangan jam karena sekolah lain juga mengalami masalah yang sama. Jika kekurangan jam maka tunjangan sertifikasi tidak akan cair.

Slamet Maryanto, seorang Guru SMA 109 Jakarta seperti yang dilansir DetikNews (12/04/2013). Dia mewakili Federasi Serikat Guru Indonesia yang menolak kurikulum 2013. Pria yang sudah mengajar selama 20 tahun ini mengayuh sepeda dari Monas menuju Istana Negara bersama empat guru lain yang membawa papan kayu bertuliskan sejumlah pesan kritis. Termasuk juga yang ikut rombongan adalah Sekjen FSGI, Retno Listyarti. “Kami tolak kurikulum ini. Ini tidak mendesak, menteri saja yang mendesak ini penting. Justru yang penting adalah kualitas guru. Jadi, benahi guru, baru urus kurikulum,” kata Retno.

Berbeda dengan guru yang mata pelajarannya dikurangi, guru yang mata pelajarannya dihapus nasibnya tidak jelas. Mereka sangat resah karena selama ini mata pencaharian sebagai pendidik pupus sudah. Jika dari sekolah negeri dan sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka tidak begitu bermasalah, hanya tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jika terjadi pada sekolah swasta itu yang menjadi masalah besar. Jadi kurikulum 2013 membuat banyak pengangguran terutama dari kalangan pendidik. Guru yang semula tenang mengajar menjadi menganggur. Nasib tragis juga dialami oleh mahasiswa yang pada kurikulum 2013 jurusan pada mata pelajarannya dihapus. Ini berarti menambah lagi pengangguran dari sektor pendidikan.

Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan dua jenis “profesi” atau pekerjaan yang saling mengisi. Pendidik dengan derajat profesionalitas tingkat tinggi sekalipun nyaris tidak berdaya dalam bekerja, tanpa dukungan tenaga kependidikan. Sebaliknya, tenaga kependidikan yang profesional sekali pun tidak bisa berbuat apa – apa tanpa dukungan guru yang profesional sebagai actor langsung di dalam dan di luar kelas, termasuk di laboratorium sekolah.

Jual Beli Gelar Semakin Marak Terjadi

Lain halnya dengan perubahan kurikulum yang terjadi di Indoseia serta guru sebagai elemen terpenting dalam mengajar sering terabaikan, potret rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga disebabkan oleh jual beli gelar yang semakin marak terjadi. Sekali lagi, Indonesia dihadapkan pada kasus yang mencoreng nama pendidikan.

Kerennya gelar di masyarakat mengakibatkan gelar mudah dicapai dan murah tinggal memilih mau yang mana asalkan membayar biaya wisudanya. Hal ini seperti yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang dilarang beroperasi seperti tersebut di atas.

Seperti artikel yang ditulis oleh Mulyadi, M.Pdsaya Guru SLTPN 22 Samarinda, Pemerhati Pendidikan dan Moral Anak (PPMA) yang saya kutip dari (<http://mulyaihza.blogspot.com/2010/05/jual-beli-gelar-mencoreng-dunia.html>) dimuat Harian Kaltimpost pada tanggal 5 Pebruari 2004 : Untuk mendapatkan ijazah S1 harus mengeluarkan uang 7,5 juta, untuk S2 = 8,5 juta, dan untuk S3 =

12,5 juta rupiah. Lantas begitu murahkah gelar doktor (Ph.D.) lagi, yang hanya seharga 1250 dollar? Padahal untuk memperoleh gelar P.hD. yang beneran tidaklah mudah, memerlukan perjuangan dan kerja keras. Untuk memperoleh gelar ini mereka harus belajar ke luar negeri bukan hanya nongkrong di rumah (Indonesia).

Pada umumnya masyarakat kita, kurang menyadari bahwa memakai gelar yang diperoleh dari lembaga pendidikan yang di larang beroperasi dan gelar palsu dikenai sanksi hukum. Ketentuan ini termuat dalam undang-undang pendidikan nasional no. 20 tahun 2003. Pada pasal 68 ayat 2 dan pasal 69 ayat 1 Bab XX tentang ketentuan pidana secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 ayat 2 Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” Sedangkan pada pasal 69 ayat 1 dikatakan “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setidaknya ketentuan pidana ini dapat mengerem maraknya jual beli gelar dan penggunaan gelar yang diperoleh secara ilegal. Pengguna gelar yang diperoleh secara ilegal (diperoleh dari lembaga yang tidak memenuhi syarat/palsu) seharusnya malu dan berpikir seribu kali, apa untungnya

memakai gelar jika ilmu yang dimiliki di bawah gelar yang dipakai.

Mereka kurang menyadari bahwa gelar yang disandangnya memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan diri dalam berbagai hal. Seharusnya kita memiliki paradigma bahwa ilmu yang kita miliki jangan sampai lebih rendah dari gelar yang kita pakai. Jika yang terjadi demikian, maka suatu saat sumber daya manusia akan berkualitas. Namun demikian, jika yang terjadi sebaliknya maka SDM kita akan merosot.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

1. Perubahan kurikulum mengalami pro dan kontra dalam penerapannya, bahkan ada yang sampai mengadakan aksi demo untuk menolaknya.
2. Guru sebagai elemen terpenting dalam mengajar sering terabaikan, profesionalitas yang dimiliki oleh guru tidak dapat diterapkan jika kurikulum terus mengalami perubahan tanpa melihat bagaimana dampak yang akan dialami oleh guru. Selain itu guru juga akan mengalami pemerosotan pendapatan terlebih guru yang bukan PNS.
3. Jual beli gelar yang semakin marak terjadi mengakibatkan potret buram pendidikan kita. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah dalam meningkatkan pendidikan lebih sungguh – sungguh lagi kearah depannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai tindak lanjut penulisan makalah ini diungkapkan saran – saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah beserta Departemen Pendidikan Nasional lebih memperhatikan apa dampak yang akan dihasilkan jika kurikulum 2013 diterapkan secara sepihak, tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan melihat bagaimana respon yang diterima dari pihak pengajar itu sendiri, siswa, bahkan masyarakatnya juga.
2. Pemerintah, sebagai pelanggan primer, Stakeholder tertinggi dalam produk pendidikan harus mampu menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan PTK dalam konteks penyelenggaraan sekolah bermutu. Untuk itu, perubahan – perubahan yang akan atau diterapkan dalam kurikulum di Indonesia seyogyanya difikirkan dan dikomunikasikan terlebih dalam dengan berbagai pihak pendidikan atau PTK salah satunya agar profesionalitas guru dalam mengajar dapat lebih ditingkatkan dan kehidupan para guru juga lebih terjamin kedepannya.
3. Sebaiknya pemerintah beserta Departemen Pendidikan Indonesia lebih giat dalam mengatasi permasalahan maraknya jual beli gelar ini, supaya pendidikan di Indonesia di masa depan dapat semakin dibenahi sehingga pendidikan di Indonesia dapat mengalami peningkatan dan tidak memberikan potret buram seperti yang terjadi saat ini.

RUJUKAN

- Abdullah, Taufik, Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam Perspektif sejarah, silaturrahi Nasional, Bandung 5 Agustus 2000
- Danim, Sudarman, dan H. Khairil. *Profesi Kependidikan*. 2010. Bandung : Alfabeta.
- Wau, Yasaratodo. *Profesi Kependidikan*. 2013. Medan : UNIMED PRESS
<http://berkarya.um.ac.id/2013/03/25/kurikulum-2013-antara-fakta-dan-opini/>
<http://cauchymurtopo.wordpress.com/2013/04/15/banyak-yang-kontra-pada-kurikulum-2013-kenapa/>
<http://ibnufajar75.wordpress.com/2013/03/22/kurikulum-2013-akankah-pendidikan-di-indonesia-menjadi-lebih-baik/>
<http://harysmk3.wordpress.com/2007/10/22/pendidikan-sekarang-dan-masa-depan/>
<http://lunnablog-luna.blogspot.com/2010/10/meng-apa-kurikulum-berubah.html>
<http://mulyaihza.blogspot.com/2010/05/jual-beli-gelar-mencoreng-dunia.html>
<http://news.detik.com/readfoto/2013/03/27/182924/2205566/157/2/aksi-menolak-kurikulum-2013991105462>
<http://pendidikanindonesia.blogspot.com/>
<http://uniisna.wordpress.com/2011/06/06/guru-masa-depan-antara-asa-dan-isu/>
<http://sitikhadijahharahap.blogspot.com/2012/11/profil-pendidikan-indonesia-masa-depan.html>
<http://www.jpnn.com/read/2013/03/15/162929/Ini-Dia-Alasan-Kurikulum-Baru-Harus-Ditolak>